

Analisis Program Komunikasi Badan Kehormatan dalam Membangun Citra Positif Anggota DPRD Provinsi Bengkulu

Sugiantoro¹, Fitria Yuliai, M.I.Kom²

^a Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Bengkulu

^b sugiantoroilkom@gmail.com

INFO ARTIKEL

ABSTRAK (10PT)

Keywords

***Program,
Badan Kehormatan,
Citra Positif***

Program Komunikasi Badan Kehormatan dalam membangun citra positif anggota DPRD sangatlah penting, yang mana Badan Kehormatan bertugas untuk menjaga martabat dan kehormatan anggota DPRD sesuai dengan kode etik DPRD. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis Program Komunikasi Badan Kehormatan dalam membangun citra positif DPRD Provinsi Bengkulu. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Cutlip dan Center yang terdiri dari penemuan fakta, perencanaan, komunikasi dan evaluasi. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, program komunikasi yang dilakukan oleh Badan Kehormatan adalah dengan melakukan kegiatan bersosialisasi langsung dengan masyarakat. Misalnya dengan cara melakukan pencitraan dengan cara membantu kegiatan yang dilakukan masyarakat, memberikan bantuan kepada masyarakat entah itu berbentuk uang atau bahan sembako. Komunikasi yang dilakukan oleh Badan Kehormatan untuk membangun citra positif anggota DPRD yaitu dengan cara menggunakan media masa, entah itu media cetak ataupun media elektronk. Terakhir, evaluasi atau penilaian program kinerja badan kehormatan ini sudah cukup baik yang mana mereka sudah melakukan kegiatan yang memang menjadi tanggung jawab mereka. Meskipun, memang masih ada masyarakat yang menilai anggota DPRD itu dari berita di media yang memang membuat citra anggota DPRD tercoreng di mata masyarakat

1. Pendahuluan

Lembaga perwakilan rakyat haruslah hadir dalam suatu negara yang menganut sebuah prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat. Dalam sistem pemerintahan demokrasi ini, lembaga perwakilan rakyat merupakan salah satu unsur yang sangat penting. Sistem demokrasi merupakan sebuah ide yang mengharuskan warga negara untuk bersifat partisipatif dalam berbagai hal, entah itu dalam bidang membuat keputusan politik, baik secara langsung ataupun melalui wakil di lembaga perwakilan.

Pada perkembangan masyarakat di era globalisasi ini, komunikasi sangatlah berpengaruh dalam memenuhi berbagai kepentingan. Oleh karena itu, komunikasi sangatlah diperlukan baik itu pada tingkat pemerintahan ataupun perusahaan. Dari hal inilah maka terbentuklah sebuah Badan Kehormatan yang digunakan untuk memantau kode etik serta mengevaluasi kinerja suatu organisasi menjaga martabat serta untuk mempertahankan citra baik dari suatu organisasi.

Badan Kehormatan merupakan salah satu lembaga yang berada di bawah naungan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) yang bertugas untuk menjawab persoalan etika dalam lembaga legislator, sehingga dibentuklah salah satu alat kelengkapan tetap yang disebut dengan Badan kehormatan (BK) berdasarkan UU No. 22 tahun 2003 yang kemudian direvisi kembali pada UU No. 27 tahun 2009 yang bertugas menegakkan kode etik di lingkungan para wakil rakyat, sebagai jawaban atas stigma masyarakat terhadap degradasi moral dan etika wakil rakyat. Dimana proses pelembagaan etika dalam lembaga publik dianggap penting untuk mendukung prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, maupun partisipasi. Bertujuan untuk mengontrol kinerja dan mengawasi etika anggota dewan. Karena lembaga ini menyangkut masalah kehormatan para wakil rakyat di DPR/DPRD, maka keberadaan BK DPR/DPRD menjadi sangat penting dibandingkan dengan kelengkapan lainnya. (dprd.bengkulukota.go.id diakses pada tanggal 17 februari 2022, pukul 19:15 WIB)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah bentuk lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan bersama dengan pemerintah. DPRD mulai dari tingkat kabupaten hingga pusat dalam menjalankan setiap tugas pemerintahannya harus mendapat kepercayaan dari masyarakat dan salah satu cara dalam membangun kepercayaan itu melalui keterbukaan informasi kepada masyarakat. (dprd.bengkulukota.go.id diakses pada tanggal 17 februari 2022, pukul 19:15 WIB)

Kehadiran Badan Kehormatan Dewan Provinsi Bengkulu mempunyai peranan yang sangat penting untuk membangun citra positif DPRD Provinsi Bengkulu. Pembentukan Badan Kehormatan ini merupakan hasil dari tanggapan dan sorotan publik yang tidak puas dan sinis. Oleh karena itu, untuk memulihkan kepercayaan masyarakat maka dibentuklah Badan Kehormatan sebagai lembaga penegak kode etik anggota dewan untuk membangun citra positif terhadap masyarakat.

Adanya argumen tentang citra negatif maupun positif anggota DPRD Provinsi Bengkulu ini sebenarnya terbentuk dari pemberitaan di media massa. Pemberitaan yang seringkali muncul di media massa terkait dengan anggota DPRD ataupun Badan Kehormatan DPRD ini biasanya mengenai ketidak tegasan Badan Kehormatan dalam menjalankan aturan. Selain pemberitaan tentang ketidaktegasan Badan kehormatan dalam menjalankan aturan juga terdapat pemberitaan mengenai etika anggota DPRD yang mana seringkali tidak mendatangi rapat.

Program komunikasi yang digunakan untuk membangun citra positif anggota DPRD Provinsi Bengkulu adalah dengan cara melakukan berbagai kegiatan yang mengikutsertakan masyarakat, karena dengan melakukan kegiatan tersebut mampu membuat masyarakat tertarik serta melakukan berbagai hal seperti misalnya memberikan bantuan pada masyarakat atau dengan melakukan kegiatan lainnya yang akan di pandang baik oleh masyarakat. Adapun media komunikasi yang digunakan Badan Kehormatan untuk membangun citra positif anggota DPRD adalah dengan menggunakan komunikasi langsung melalui sosialisasi atau dengan menggunakan media komunikasi elektronik dan cetak, misalnya dengan menggunakan televisi, radio handphone, berita online dan juga bisa melalui koran. Selain itu upaya dari Badan Kehormatan untuk membangun citra positif DPRD Provinsi adalah dengan memberikan pemahaman terhadap anggota DPRD supaya anggotanya tidak melakukan pelanggaran kode etik

2. Metodologi

2.1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasi

(Sugiyono : 2011:19-20). Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka di Kantor DPRD Provinsi Bengkulu. Fokus dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis Program Komunikasi Badan Kehormatan Dalam Membangun Citra Positif Anggota DPRD Provinsi Bengkulu..

2.2. Pengumpulan Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yakni data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya yaitu Badan Kehormatan DPRD Provinsi Bengkulu. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber yang ada berupa dokumen-dokumen, laporan-laporan dan arsip-arsip resmi lainnya yang bersifat relevan

3. Teori

Penelitian ini menggunakan teori dari Cutlip dan Centerproses PR sepenuhnya mengacu pada pendekatan manajerial, proses ini terdiri dari :

1. Penemuan Fakta

Penemuan Fakta disini digunakan untuk menentukan permasalahan yang terjadi dan untuk mengetahui penyebabnya. Dalam tahap ini kita perlu meneliti, memantau, pendapat, sikap dan perilaku pihak yang bersangkutan atau berpengaruh dalam suatu perusahaan atau suatu organisasi. Hal-hal yang perlu diketahui dalam tahap ini yaitu sebagai berikut :

- a) Pandangan masyarakat terhadap kesalahan yang dilakukan Oleh Pihak DPRD Provinsasi Bengkulu.
- b) Hal-hal yang diketahui atau yang tidak ketahui oleh masyarakat mengenai DPRD Provinsi Bengkulu.

2. Perencanaan

Pada tahap ini peneliti sudah menemukan penyebab dan permasalahan yang terjadi terhadap DPRD Provinsi Bengkulu. Sehingga sudah siap dengan langkah perencanaan dan penyusunan sebuah program. Beberapa hal yang perlu diketahui pada tahap perencanaan dan program ini adalah :

- a) Perencanaan dan penyusunan program apa saja yang dilakukan oleh badan kehormatan untuk membangun citra positif DPRD Provinsi Bengkulu.
- b) Untuk mengetahui kapan atau waktu pelaksanaan program kerja badan kehormatan.

3. Komunukasi

Yang dimaksud dengan komunikasi disini adalah melakukan tindakan dan berkomunikasi yang sudah dari awal dirancang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Hal-hal yang berkaitan dalam tahap ini adalah sebagai berikut :

- a) Bentuk kegiatan apa saja yang dilakukan oleh pihak badan kehormatan agar mampu membangun citra positif DPRD Provinsi Bengkulu.
- b) Media apa saja yang digunakan oleh pihak badan kehormatan untuk memberikan informasi mengenai kegiatan yang dilakukan oleh badan kehormatan.

4. Evaluasi Program

Pada tahap ini, mencakup kedalam segala penilaian serta evaluasi atas langkah-langkah berupa persiapan, pelaksanaan dan hasil dari program-program yang sudah dilakukan sebelumnya. Beberapa hal yang perlu diketahui pada tahap ini adalah sebagai berikut :

- a) Efek apa saja yang ditimbulkan setelah menginformasikan kegiatan yang dilakukan oleh badan kehormatan.
- b) Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dialami oleh badan kehormatan dalam melaksanakan program kerja.

4. Temuan dan Pembahasan

Program komunikasi yang dilakukan oleh Badan Kehormatan adalah dengan melakukan kegiatan bersosialisasi langsung dengan masyarakat. Misalnya dengan cara melakukan pencitraan dengan cara membantu kegiatan yang dilakukan masyarakat, memberikan bantuan kepada masyarakat entah itu berbentuk uang atau bahan sembako. Komunikasi yang dilakukan oleh Badan Kehormatan untuk membangun citra positif anggota DPRD yaitu dengan cara menggunakan media masa, entah itu media cetak ataupun media elektronk. Penilaian program kinerja badan kehormatan ini sudah cukup baik yang mana mereka sudah melakukan kegiatan yang memang menjadi tanggung jawab mereka. Meskipun, memang masih ada masyarakat yang menilai anggota DPRD itu dari berita di media yang memang membuat citra anggota DPRD tercoreng di mata masyarakat.

Penelitian ini membahas tentang analisis program komunikasi Badan Kehormatan dalam membangun citra Positif Anggota DPRD Provinsi Bengkulu 4 (empat) indikator menurut Cutlip dan Center dalam buku Ruslan Rosady (2010) yaitu sebagai berikut :

Penemuan Fakta

Penemuan fakta dilapangan mengenai anggota DPRD yang menjelaskan bahwa permasalahan yang sering terjadi di kalangan anggota DPRD tidak ada yang terlalu serius atau berarti sehingga masih bisa di toleransi. Selain itu mengenai permasalahan kenapa Badan Kehormatan itu dibentuk karna untuk mengawasi kinerja anggota DPRD serta untuk menjaga agar tidak ada anggota DPRD yang melakukan pelanggaran kode etik. Untuk informasi dan program yang dialikan oleh anggota badan kehormatan untuk membangun citra positif anggota DPRD ini yaitu melalui media sosial dan media elektronik seperti televisi.

Perencanaan

program atau rencana yang dilakukan oleh Badan Kehormatan untuk membangun Citra Positif Anggota DPRD yaitu membuat membuat laporan kinerja pada akhir pamas keanggotaan, meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan Tata Tertib dan Kode Etik, melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD atas pengaduan pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih, menyampaikan laporan atas keputusan badan kehormatan kepada paripurna DPRD.

Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan Badan Kehormatan dan Anggota DPRD yaitu dengan cara menggunakan media masa, entah itu media elektronik atau media cetak. Selain itu Badan kehormata beserta anggotanya juga melakukan komunikasi melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat.

Evaluasi

Penilaian program kinerja Badan kehormatan DPRD Provinsi Bengkulu ini sudah cukup baik yang mana mereka sudah melakukan kegiatan yang memang sudah menjadi tanggung jawab mereka. Namun, memang ada beberapa masyarakat yang menilai anggota DPRD itu dari berita di media yang memang beritanya membuat masyarakat berfikir bahwa citra DPRD tercoreng dimata masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka program yang digunakan anggota Badan Kehormatan untuk membangun citra positif anggota DPRD Provinsi Bengkulu ini tidak luput dengan adanya upaya dan pelaksanaan Badan Kehormatan. Adapun upaya yang dilakukan adalah melakukan berbagai kegiatan yang mengikutsertakan masyarakat, karena dengan melakukan kegiatan tersebut mampu membuat masyarakat tertarik serta melakukan berbagai hal seperti misalnya memberikan bantuan pada masyarakat atau dengan melakukan kegiatan lainnya yang akan di pandang baik oleh masyarakat. Selain itu upaya dari Badan Kehormatan untuk membangun citra positif DPRD Provinsi adalah dengan memberikan pemahaman terhadap anggota DPRD supaya anggotanya tidak melakukan pelanggaran kode etik.

5. Penutup

Berdasarkan hasil dari pembahasan ini mengenai Program komunikasi Badan Kehormatan untuk membangun citra positif anggota DPRD di kalangan masyarakat, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa strategi komunikasi yang digunakan untuk membangun citra positif anggota DPRD Provinsi Bengkulu adalah dengan cara melakukan berbagai kegiatan yang mengikutsertakan masyarakat, karena dengan melakukan kegiatan tersebut mampu membuat masyarakat tertarik serta melakukan berbagai hal seperti misalnya memberikan bantuan pada masyarakat atau dengan melakukan kegiatan lainnya yang akan di pandang baik oleh masyarakat.

Program komunikasi yang dilakukan oleh Badan Kehormatan adalah dengan melakukan kegiatan bersosialisasi langsung dengan masyarakat. Misalnya dengan cara melakukan pencitraan dengan cara membantu kegiatan yang dilakukan masyarakat, memberikan bantuan kepada masyarakat entah itu berbentuk uang atau bahan sembako. Komunikasi yang dilakukan oleh Badan Kehormatan untuk membangun citra positif anggota DPRD yaitu dengan cara menggunakan media masa, entah itu media cetak ataupun media elektronk. Penilaian program kinerja badan kehormatan ini sudah cukup baik yang mana mereka sudah melakukan kegiatan yang memang menjadi tanggung jawab mereka. Meskipun, memang masih ada masyarakat yang menilai anggota DPRD itu dari berita di media yang memang membuat citra anggota DPRD tercoreng di mata masyarakat

References

- Arni, Muhammad. 2009. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Balai Pustaka. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Cangara, Hafied. 2014. *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Effendy, Uchjana, Onong. 2011. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Afriadi, Reza. 2010. *Program Komunikasi Humas POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk Membentuk Citra Positif Polisi*. Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
- Fakhrurrozi, Irfan, Muhammad. 2020. *Program Humas SMKN 2 Pekanbaru Dalam Mempertahankan Citra SMK Unggulan*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Huzaini, Adis. 2017. *Program Humas Pemerintahan Kabupaten Bangkalan Dalam Membangun Citra Bangkalan Kota Dzikir Sholawat*. Universitas Muhammadiyah Malang
- Rahmi, Elvita. 2014. *Strategi Humas Dalam Meningkatkan Citra Perusahaan Di PT. Akses (Persero) Cabang Utama Pekan Baru*. Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau